



Peran Pemerintah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso

Muh. Wahyu Saputra J. Pakaya

Lisda Van Gobel

Yahya Antu

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Pos-el: wahyupakaya4@gmail.com

lisdavangobel69@gmail.com,

yahyaantu03@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v11i3.2341

Abstrak

Latar belakang penelitian mengkaji fenomena meningkatnya angka anak putus sekolah yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta kurang optimalnya intervensi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota utara Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fasilitas penunjang untuk anak putus sekolah masih kurang optimal, seperti belum meratanya realisasi program, rendahnya akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan pendidikan. Pemerintah juga sebagai motivator masih kurang optimal, hal ini disebabkan implementasi dan dorongan pemerintah di nilai belum maksimal dan belum merata dirasakan oleh anak-anak yang mengalami putus sekolah. Selain itu, pemerintah sebagai mobilisator dinilai masih belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah belum mampu menggerakkan elemen-elemen masyarakat atau tokoh masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Penelitian ini menyarankan bahwa peran aktif pemerintah kelurahan sangat diperlukan untuk menurunkan angka anak putus sekolah melalui pendekatan fasilitasi, motivasi, dan mobilisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci

Anak putus sekolah, peran pemerintah, fasilitator, motivator, mobilisator

Abstract

The phenomenon of increasing numbers of school dropouts in Madale Village, influenced by socio-economic factors, as well as less than optimal government intervention, has become an urgent need to be studied in order to evaluate the role of the government in effectively overcoming this problem. This study aims to determine and describe the role of the government in overcoming school dropouts in Madale Village, North Poso City District, Poso Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods in the form of in-depth interviews, direct observation, and documentation. The results of the study indicate that supporting facilities for school dropouts are still less than optimal, such as uneven program realization, low community access to information and educational assistance. The government as a motivator is also still less than optimal, this is because the implementation and encouragement of the government are considered not optimal and have not been evenly felt by children who have dropped out of school. In addition, the government as a mobilizer is considered still not optimal, this is because the government has not been able to mobilize

elements of society or community leaders to help overcome the problem of school dropouts. This study suggests that the active role of the village government is very much needed to reduce the number of school dropouts through a more effective and sustainable facilitation, motivation, and mobilization approach.

Keywords

School dropouts, role of government, facilitator, motivator, mobilizer

Pendahuluan

Pendidikan adalah sarana penting untuk mengembangkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Perannya sangat vital dalam pembangunan bangsa dan negara, sebab keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang diterapkan. Pendidikan yang baik mampu melahirkan warga negara berkarakter, berdaya saing, serta memiliki kemampuan dalam menguasai teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, mutu pendidikan suatu masyarakat mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penopang percepatan pembangunan secara keseluruhan.

Kemajuan suatu bangsa memerlukan dukungan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga setiap anak usia sekolah seharusnya memperoleh pendidikan. Namun, kenyataannya saat ini masih ada anak-anak yang tidak menuntaskan pendidikan sesuai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dikenal sebagai anak putus sekolah, yaitu anak-anak yang berhenti mengikuti program pendidikan sebelum menyelesaikannya tepat pada waktunya. Pada era Revolusi Industri 4.0, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung proses belajar, sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dapat beradaptasi atau bahkan menciptakan perubahan positif sesuai tuntutan zaman. Dalam era ini, manusia dan teknologi diintegrasikan untuk membuka peluang-peluang baru yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitasnya.

Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir angka anak putus sekolah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada periode 2019–2023, tantangan besar dihadapi terkait tingginya jumlah anak yang meninggalkan bangku sekolah. Pada tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dari total 28,9 juta siswa, sekitar 0,20% atau 55.300 siswa tercatat putus sekolah. Selain itu, 4,12% lulusan SD dan MI, setara dengan 193.400 siswa, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Di tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dari 14,6 juta siswa, 0,22% atau 29.700 siswa berhenti sekolah, dan 5,4% atau sekitar 233.970 lulusan tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau sederajat. Secara keseluruhan, pada tahun 2022 terdapat 3.847.780 anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dengan 491.311 di antaranya mengalami putus sekolah pada awal tahun ajaran.

Kabupaten Poso, adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi tengah yang tidak luput dari permasalahan Anak putus sekolah. Data dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten poso menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah di kota ini mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hingga tahun 2023 , tercatat sebanyak 3.382 siswa putus

sekolah di Kabupaten Poso . Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan Anak putus sekolah masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan Anak putus sekolah pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah di kecamatan poso kota utara Kabupaten Poso. Beberapa peran penting yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menjalankan fungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Namun, realitas yang terjadi di Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, justru menunjukkan kondisi sebaliknya, di mana peran pemerintah belum berjalan secara efektif. Tingkat kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan masih rendah, bahkan ada yang lebih memprioritaskan anak untuk bekerja daripada bersekolah. Peran pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi akses pendidikan bagi anak putus sekolah juga masih terbatas, sebab tidak semua kelurahan memiliki akses langsung atau kemampuan memadai untuk menyalurkan bantuan pendidikan kepada anak yang membutuhkan. Sosialisasi maupun dukungan emosional terkait pentingnya pendidikan yang dilakukan pemerintah kelurahan belum merata dan kurang intensif. Selain itu, berbagai program bantuan pendidikan seperti beasiswa atau subsidi kerap tidak tersalurkan secara tepat sasaran karena keterbatasan data yang valid dan akurat mengenai anak putus sekolah. Pemerintah kelurahan juga masih menghadapi tantangan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan anak putus sekolah.

Berikut adalah data jumlah anak putus sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Data ini dilampirkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi pendidikan di wilayah tersebut.

Tabel 1
Data Jumlah Anak Putus Sekolah di Kelurahan Madele

No	Tahun	Anak Putus Sekolah SD	Anak Putus Sekolah SMP	Anak Putus Sekolah SMA	Total	Persentase
1	2019	6	8	9	23	13,85%
2	2020	8	9	11	28	16,86%
3	2021	9	11	13	33	19,87%
4	2022	9	13	15	37	22,28%
5	2023	11	16	18	45	27,10%
	Total	43	57	66	166	

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso”. Peneliti mengidentifikasi permasalahan yaitu; Peran pemerintah Kelurahan Madale dalam mengatasi anak putus sekolah dalam hal memfasilitasi masih kurang optimal yang di mana tidak semua pemerintah kelurahan memiliki akses langsung untuk memfasilitasi bantuan pendidikan; kedua kurangnya sosialisasi atau dukungan emosional yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan tentang pentingnya pendidikan belum merata dan kurang intensif; ketiga pemerintah kelurahan masih sulit dalam menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak putus sekolah. Rumusan masalah yaitu; Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

Metode

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan (Rukajat, 2018) Studi kualitatif adalah studi yang digunakan untuk menggambarkan dan mengkaji fenomena aktivis, olahraga sosial, sikap, cita-cita, persepsi, dan mereka secara pribadi atau dalam bisnis. (Moha, 2019) Menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang biasa disebut dengan narasumber.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil dan pembahasan penelitian ini mengenai Peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Dengan fokus penelitian ini adalah, Fasilitator, Motivator, Mobilisator, yang akan di jelaskan sebagai berikut.

1. Fasilitator

Fasilitator dalam konteks penelitian ini merujuk pada peran penting pihak yang berfungsi memahami dan menangani secara mendalam permasalahan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah. Anak putus sekolah merupakan persoalan serius yang memengaruhi masa depan generasi muda serta pembangunan daerah. Dalam hal ini, fasilitator bertindak sebagai pendamping yang menghubungkan anak-anak tersebut dengan peluang untuk kembali mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang relevan. Namun, peran pemerintah sebagai fasilitator masih belum berjalan secara optimal. Hambatan yang muncul antara lain ketidakmerataan pelaksanaan program, minimnya pendampingan langsung, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi maupun bantuan pendidikan seperti beasiswa. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dan pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas intervensi pemerintah kelurahan dalam mengatasi masalah anak putus sekolah.

2. Motivator

Motivator dalam penelitian ini dimaknai sebagai pihak yang berperan penting dalam memberikan pemahaman mendalam terkait upaya mengatasi masalah anak putus sekolah. Masalah ini merupakan tantangan serius yang dapat berdampak pada masa depan generasi muda serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, motivator berfungsi sebagai penggerak yang menumbuhkan inspirasi dan memberikan dorongan agar anak-anak tersebut kembali menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan mereka. Namun, peran pemerintah sebagai motivator dinilai belum optimal. Implementasi dan dorongan yang diberikan belum maksimal serta belum merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami putus sekolah. Banyak masyarakat menilai bentuk motivasi yang ada masih bersifat umum dan kurang menyentuh akar permasalahan, seperti ketiadaan pendampingan intensif, minimnya bantuan nyata, serta kurangnya tindak lanjut dari program yang telah disosialisasikan. Selain itu, kendala ekonomi dan terbatasnya akses



informasi menjadi faktor utama yang menghambat anak-anak untuk kembali melanjutkan pendidikan.

3. Mobilisator

Mobilisator dalam penelitian ini diartikan sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menggerakkan dan mendorong berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan anak putus sekolah. Isu ini merupakan persoalan krusial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, mobilisator berfungsi sebagai penggerak sosial yang mengajak keterlibatan aktif keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk mencari solusi bersama. Namun, peran pemerintah sebagai mobilisator dinilai belum optimal. Banyak orang tua dan anak putus sekolah belum merasakan manfaat langsung dari program yang telah dicanangkan, baik dalam bentuk bantuan pendidikan maupun akses pembelajaran. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan pelaksanaannya secara nyata di tingkat masyarakat.

Pembahasan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, peneliti akan membahas hasil wawancara tersebut melalui fokus tentang peran pemerintah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

Fasilitator dalam konteks penanganan anak putus sekolah adalah pihak atau individu yang berperan sebagai penghubung, pendamping, sekaligus pendorong perubahan dalam proses pendidikan, terutama dalam membantu anak-anak yang telah atau berisiko putus sekolah agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan. Menurut (Van Gobel et al., 2024). Pemerintah merupakan lembaga administratif resmi, mulai dari tingkat desa hingga daerah, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengelola kelembagaan melalui pengaturan struktur, penerapan disiplin, pembangunan komunikasi, dan kerja sama antar aparat. Menurut (Firdaus, 2020). Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Pemerintah Kelurahan Madale, dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah anak putus sekolah, seperti melakukan pendataan, melakukan pendekatan langsung kepada keluarga, bekerja sama dengan sekolah dan dinas pendidikan dalam penyaluran beasiswa, serta memberikan layanan edukasi, konseling, dan advokasi bagi keluarga. Namun, di sisi lain, upaya tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata. Banyak warga mengaku belum pernah menerima beasiswa, tidak mendapatkan penyuluhan atau kunjungan langsung dari pihak kelurahan, dan masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat belajar dan layanan pendamping. Selain itu, rencana program yang pernah disampaikan dalam rapat warga dinilai tidak ditindaklanjuti, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mengalami kesulitan untuk kembali bersekolah.

Motivator dalam konteks penanganan anak putus sekolah adalah individu atau pihak yang berperan memberikan semangat, inspirasi, dan keyakinan kepada anak-anak agar mereka

terdorong memiliki kemauan serta keberanian untuk kembali melanjutkan pendidikan. Peran motivator mencakup membangkitkan kembali minat belajar, memperkuat rasa percaya diri, serta mengubah cara pandang anak terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Menurut (Simbolon et al., 2021) Peran pemerintah sebagai motivator dalam pendidikan adalah memberikan dukungan moral dan psikologis kepada peserta didik, khususnya anak-anak yang mengalami hambatan seperti putus sekolah, agar mereka kembali memiliki semangat untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan. Pemerintah Kelurahan Madale, dalam kapasitasnya sebagai motivator, telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi anak putus sekolah, antara lain memberikan motivasi, melakukan pendekatan langsung kepada keluarga, mengadakan penyuluhan pendidikan, memberikan pendampingan, serta menyalurkan bantuan biaya pendidikan. Upaya-upaya ini dinilai cukup efektif karena dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan anak, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung anak-anak kembali bersekolah. Namun, sebagian besar masyarakat dan anak putus sekolah menilai bahwa dorongan dan motivasi dari pemerintah kelurahan masih terbatas dan belum menyentuh inti permasalahan secara langsung. Bantuan yang diberikan dianggap kurang konkret, penyuluhan hanya berupa himbauan tanpa tindak lanjut, serta tidak adanya pendampingan intensif dan bantuan nyata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Akibatnya, langkah yang diambil pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam memotivasi anak-anak untuk kembali mengenyam pendidikan.

Mobilisator dalam konteks penanganan anak putus sekolah adalah individu atau pihak yang berperan mendorong, mengajak, dan mengoordinasikan berbagai unsur masyarakat untuk bersama-sama bertindak dalam mengatasi permasalahan sosial, termasuk isu anak putus sekolah. Menurut (Antu et al., 2023) Peran merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana sehingga tujuan dapat tercapai. Peran ini sangat penting karena pimpinan memiliki otoritas dalam mengelola dan mengarahkan organisasinya. Sementara Menurut (Ramadhani putri, 2020) Peran pemerintah sebagai mobilisator adalah mengarahkan dan menggerakkan berbagai pihak untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan bersama. Pemerintah Kelurahan Madale, dalam kapasitasnya sebagai mobilisator, telah melakukan sejumlah langkah, antara lain menggerakkan masyarakat, RT/RW, dan lembaga pendidikan melalui kegiatan sosialisasi, pendataan anak putus sekolah, serta menjalin kerja sama dengan sekolah dan dinas terkait untuk penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi terkait dengan menampung serta menyampaikan aspirasi dan keluhan, khususnya yang berkaitan dengan kendala ekonomi dan akses pendidikan. Namun, di sisi lain, upaya tersebut dinilai belum optimal. Sosialisasi program bantuan masih terbatas, komunikasi dinilai kurang efektif, dan keluhan masyarakat jarang mendapatkan tindak lanjut. Minimnya pendekatan personal serta ketidakhadiran pemerintah maupun pihak sekolah di tengah masyarakat menyebabkan banyak anak kehilangan kesempatan untuk kembali bersekolah, meskipun mereka sebenarnya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan.



Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian pada aspek fasilitator dalam penanganan anak putus sekolah menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Madale masih belum optimal. Meskipun telah ada wacana atau penyampaian terkait program bantuan pendidikan, pelaksanaannya belum merata dan belum terwujud secara nyata. Kurangnya pendampingan langsung, ketiadaan kunjungan ke rumah warga, serta minimnya fasilitas pendukung seperti ruang belajar menjadi faktor utama yang menghambat anak-anak untuk kembali bersekolah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keadaan ekonomi masyarakat yang umumnya tergolong lemah, sehingga memerlukan intervensi nyata dari pemerintah setempat.
2. Hasil penelitian pada aspek motivator dalam penanganan anak putus sekolah menunjukkan bahwa dorongan dan motivasi yang diberikan Pemerintah Kelurahan Madale kepada anak-anak putus sekolah masih dianggap sangat minim oleh masyarakat. Meski terdapat penyuluhan atau himbauan, pelaksanaannya cenderung bersifat formalitas dan tidak disertai langkah nyata yang mampu mendorong anak-anak untuk kembali melanjutkan pendidikan.
3. Hasil penelitian pada aspek mobilisator dalam penanganan anak putus sekolah menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Madale masih kurang optimal dalam menggerakkan berbagai elemen masyarakat untuk turut menangani masalah tersebut. Terbatasnya kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan pendekatan langsung dari pihak kelurahan maupun tokoh masyarakat menyebabkan banyak orang tua tidak mengetahui adanya bantuan atau dukungan yang sebenarnya tersedia.

Daftar Rujukan

- Antu, Y., Hasu, A., & Van Gobel, L. (2023). *Peran Kepala Desa dalam Menanggulangi Banjir di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara*.
- Firdaus, R. (2020). *Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara*.
- Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif. Ragam Penelitian Kualitatif*.
- Ramadhani putri. (2020). *Peran pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan Desa Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Van Gobel, L., Aneta, Y., Isa, R., Usulu, E. M., & Sos, S. (2024). *Budaya dan perilaku birokrasi menyelami dimensi dimensi organisasi publik: buku referensi*. PT. Media Penerbit Indonesia.

